

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga

Halaman 26

Tunggakan Pajak Kendaraan Rata-Rata Rp1M/Bulan

SIDOREJO - Tunggakan pajak kendaraan bermotor masyarakat di Salatiga rata-rata Rp 1 miliar per bulan. Sedangkan di wilayah Kabupaten Semarang, tunggakan per bulan mencapai Rp 2 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Semarang, Noor Hadi bersama Kepala UPPD Salatiga, Kartiko Sukarno usai penandatanganan perjanjian kerja sama Pemprov Jateng dengan Kodim 0714 Salatiga, dalam rangka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Makodim, Senin (18/9).

Penandatanganan dari Kodim 0714 diwakili Dandim Letkol Asjur Bahasoan.

"Tunggakan UPPD Kabupaten Semarang periode Januari-31 Agustus 2017 sebanyak Rp 16,7 miliar dengan objek sebanyak 81.966. Artinya, setiap bulan tunggakan di wilayah UPPD Kabupaten Semarang mencapai Rp 2,1 miliar,

"katanya.

Di wilayah Salatiga, menurut Kepala UPPD Salatiga Kartiko, tunggakan pajak kendaraan bermotor dari Januari hingga 31 Agustus mencapai Rp 5 miliar. Jadi, jika dirata-rata satu bulan mendekati Rp 1 miliar.

Ikut Mengingat

Noor Hadi menambahkan, target murni pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang tahun 2017 sebanyak Rp 208,9 miliar.

Target murni bagi hasil yang diberikan kepada Kabupaten Semarang tahun 2017 dari total PAD adalah Rp 138,7 miliar. Adapun penerimaan PKB dan BBNKB

hingga 14 September 2017 sebesar Rp 78,1 miliar untuk PKB yang berarti 74% dan Rp 70,5 miliar untuk BBNKB yang berarti 69,5%.

"Perlu upaya-upaya ekstra yang harus dilakukan untuk mengurangi jumlah tunggakan, antara lain dari pintu ke pintu, razia kendaraan bermotor, pendekatan pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari pusat kota, dan mendirikan gerai Samsat, Samsat Paten, dan Samsat Keliling," tuturnya.

Dalam hal mengingatkan wajib pajak yang menunggak, lanjut Noor Hadi, pihaknya menggandeng TNI di wilayah Kodim Salatiga. Nantinya para Babinsa TNI yang bertugas di desa-desa agar ikut mengingatkan warga yang menunggak membayar pajak untuk segera membayarnya.

"Kerja sama dengan TNI ini, cukup efektif dan sudah dilakukan di wilayah lain di Jateng. Nanti setiap wajib pajak yang menunggak, akan kami beri surat pemberitahuan tung-

gakan. Prajurit TNI kami ajak ikut mengingatkan warga, tetapi bukan penagihan. Jika warga kesulitan membayar karena lokasi yang jauh

dengan kantor Samsat, kami bersedia datang ke warga tetapi dengan membayar yang kolektif, misalnya 100 orang," terangnya. (H32-38)